

PENYULUHAN PENURUNN STUNTING 18 WARGA DESA PERJUANGAN

Dany Try Utama Hutabarat¹, Syahransyah², Putri³, Kiki Nur Aidah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Asahan

danytryhutamahutabarat@gmail.com

ABSTRACT; *Stunting is a chronic nutritional problem that seriously impacts the quality of human resources and national development. Batu Bara Regency still faces a relatively high stunting prevalence rate, including in Perjuangan Village, Sei Balai District, where 18 residents were recorded as stunted in 2024. This study aims to describe the implementation of Community Service (PKM) activities in the form of counseling and mentoring to reduce stunting based on village policies. The methods used included coordination with the village government and Family Welfare Development (PKK) partners, the development of Village Regulations (Perdes) on stunting reduction, policy dissemination, and the implementation of nutritional fulfillment according to nutritionist recommendations. The results of the activities showed increased public understanding of stunting, the implementation of nutritional fulfillment programs for target groups, and the formation of a collaborative model between the village government, PKK, health workers, lecturers, and students. This activity confirms that an integrated and sustainable village policy approach is an effective strategy in reducing stunting rates at the local level.*

Keywords: *Stunting, Community Service, Village Regulations, Nutrition, PKK.*

ABSTRAK; Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional. Kabupaten Batu Bara masih menghadapi angka prevalensi stunting yang cukup tinggi, termasuk di Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai, yang pada tahun 2024 tercatat sebanyak 18 warga mengalami stunting. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berupa penyuluhan dan pendampingan penurunan stunting berbasis kebijakan desa. Metode yang digunakan meliputi koordinasi dengan pemerintah desa dan mitra Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang penurunan stunting, sosialisasi kebijakan, serta implementasi pemenuhan gizi sesuai rekomendasi ahli gizi. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai stunting, terlaksananya program pemenuhan gizi terhadap kelompok sasaran, serta terbentuknya model kolaborasi antara pemerintah desa, PKK, tenaga kesehatan, dosen, dan mahasiswa. Kegiatan ini menegaskan bahwa pendekatan kebijakan desa yang terintegrasi dan berkelanjutan merupakan strategi efektif dalam menekan angka stunting di tingkat lokal.

Kata Kunci: Stunting, Pengabdian kepada Masyarakat, Peraturan Desa, Gizi, PKK.

PENDAHULUAN

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang panjang, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang meliputi masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun (Putra & Helmi, 2024). Stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, produktivitas di masa depan, serta meningkatkan risiko penyakit degeneratif.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2019 mencapai 31,88% dan mengalami penurunan menjadi 30,9% pada tahun 2021 (Christiana et al., 2025). Melalui berbagai program intervensi, angka tersebut menurun menjadi 21,7% pada tahun 2022, namun upaya penurunan stunting masih harus terus diperkuat untuk mencapai target nasional sebesar 14% sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Safirah, 2023).

Desa Perjuangan, Kecamatan Sei Balai, merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi persoalan stunting. Berdasarkan data petugas gizi Puskesmas Sei Balai tahun 2024, tercatat sebanyak 18 warga Desa Perjuangan mengalami stunting. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi yang serius dan berkelanjutan, tidak hanya melalui pendekatan kesehatan, tetapi juga melalui kebijakan di tingkat desa.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi sebagai dasar kebijakan daerah. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada implementasi di tingkat desa. Oleh karena itu, penguatan regulasi desa melalui Peraturan Desa (Perdes) tentang penurunan stunting menjadi langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan program dan keterlibatan aktif masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini difokuskan pada penyuluhan dan pendampingan penurunan stunting terhadap 18 warga Desa Perjuangan dengan pendekatan kebijakan desa, pemberdayaan PKK, serta pemenuhan gizi berbasis rekomendasi ahli gizi

METODE PENELITIAN

Berdasarkan berbagai masalah yang muncul, metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
 - a. Tim melakukan koordinasi awal dengan Pemerintah Desa Perjuangan dan mitra PKK.
 - b. Tim mengidentifikasi permasalahan stunting yang terjadi di masyarakat.
 - c. Tim menyusun rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Tim menyusun draft Peraturan Desa (Perdes) tentang penurunan stunting.
 - e. Melibatkan tenaga ahli gizi dalam penyusunan Perdes dan perencanaan program.
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Tim melaksanakan sosialisasi kebijakan penurunan stunting kepada masyarakat
 - b. Tim memberikan penyuluhan tentang pentingnya gizi seimbang pada:
 1. Masa kehamilan,
 2. Masa pasca melahirkan,
 3. Masa pertumbuhan anak.
 - c. Tim mengimplementasikan program pemenuhan gizi kepada 18 warga yang teridentifikasi mengalami stunting.
 - d. Tim Melaksanakan program pemenuhan gizi melalui pemberian Menu Dashat I dan Menu Dashat II sesuai rekomendasi ahli gizi.
3. Tahap Evaluasi
 - a. Melakukan pemantauan perkembangan status gizi kelompok sasaran.
 - b. Mengevaluasi efektivitas program dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan.
 - c. Menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan dan keberlanjutan program di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya penurunan angka stunting di Desa Perjuangan merupakan kebutuhan mendesak yang harus ditangani secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berimplikasi pada perkembangan

kecerdasan, kesehatan jangka panjang, serta kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial atau insidental, melainkan harus melalui kebijakan yang memiliki kekuatan mengikat serta melibatkan seluruh unsur pemerintahan desa dan masyarakat.

Berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Desa Perjuangan, permasalahan stunting tidak terlepas dari keterbatasan pemahaman tentang gizi, rendahnya akses terhadap pemenuhan gizi seimbang, serta faktor ekonomi yang memengaruhi kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan anak. Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan penurunan stunting harus dimulai sejak tahap paling awal kehidupan manusia, yakni sejak masa kehamilan, dilanjutkan pada masa kelahiran, dan berlanjut hingga masa pertumbuhan anak dan remaja.

Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, tim pengabdian menawarkan solusi yang bersifat komprehensif melalui penyusunan Peraturan Desa tentang Penurunan Stunting di Desa Perjuangan. Peraturan Desa ini dirancang sebagai instrumen kebijakan yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program, tetapi juga sebagai bentuk komitmen pemerintah desa dalam menjamin pemenuhan gizi masyarakat secara berkesinambungan. Dengan adanya Perdes, seluruh program penurunan stunting memiliki dasar hukum yang jelas, mekanisme pelaksanaan yang terukur, serta pembagian peran yang tegas antara pemerintah desa, tenaga kesehatan, PKK, dan masyarakat.

Peraturan Desa tentang Penurunan Stunting tersebut memuat program-program unggulan yang disusun berdasarkan pendekatan siklus kehidupan (*life cycle approach*). Pendekatan ini menekankan bahwa pencegahan stunting harus dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan, mulai dari masa kandungan, masa pasca melahirkan, hingga masa pertumbuhan anak dan remaja. Oleh karena itu, dalam Perdes akan diatur tiga program utama, yaitu Program Masa Kandungan, Program Pasca Melahirkan, dan Program Masa Pertumbuhan, yang masing-masing saling terintegrasi dan saling mendukung dalam menekan angka stunting di Desa Perjuangan.

Program pertama adalah Program Masa Kandungan, yang difokuskan pada upaya pencegahan gizi buruk sejak bayi masih berada dalam kandungan. Program ini didasarkan pada pemahaman bahwa permasalahan stunting pada anak sangat berkaitan erat dengan kondisi kesehatan dan kecukupan gizi ibu hamil. Kekurangan gizi pada masa kehamilan berpotensi menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah dan berdampak pada gangguan

pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, dalam Perdes akan diatur kebijakan pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan pasca melahirkan sebagai bagian dari upaya preventif penurunan stunting.

Pelaksanaan Program Masa Kandungan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, setiap ibu hamil diwajibkan untuk melaporkan kondisi kehamilannya kepada pemerintah desa. Laporan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk melakukan pendataan dan tindak lanjut berupa pemberian perhatian khusus terhadap kebutuhan gizi ibu hamil. Kedua, pemerintah desa akan berkoordinasi dengan bidan desa atau tenaga kesehatan setempat untuk memastikan ibu hamil mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara rutin, pemberian vitamin, serta makanan tambahan yang bergizi. Ketiga, menjelang dan setelah proses persalinan, bayi yang dilahirkan akan mendapatkan pemantauan kesehatan secara khusus, termasuk pemantauan berat badan, tinggi badan, dan perkembangan kecerdasannya melalui kegiatan posyandu secara berkala. Seluruh rangkaian kegiatan ini diatur secara eksplisit dalam Perdes sebagai program wajib yang harus dilaksanakan.

Program kedua adalah Program Pasca Melahirkan, yang menitikberatkan pada pemenuhan gizi dan keselamatan bayi setelah kelahiran. Program ini dirancang dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Perjuangan yang sebagian besar mengalami keterbatasan ekonomi. Biaya pemenuhan gizi bayi, seperti susu, makanan pendamping ASI, serta pemeriksaan kesehatan rutin, sering kali menjadi beban bagi keluarga. Kondisi ini berpotensi menyebabkan bayi tidak memperoleh asupan gizi yang optimal, sehingga meningkatkan risiko terjadinya stunting.

Melalui Program Pasca Melahirkan, pemerintah desa bersama mitra Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berperan aktif dalam membantu pemenuhan kebutuhan gizi bayi. Program ini dituangkan dalam kebijakan Perdes yang mengatur keterlibatan PKK dalam penyediaan makanan tambahan bergizi, pendampingan ibu menyusui, serta edukasi mengenai pola asuh dan pemberian gizi yang tepat bagi bayi. Selain itu, Perdes juga mendorong adanya dukungan terhadap pemeriksaan kesehatan bayi secara rutin agar perkembangan bayi dapat terpantau dengan baik tanpa membebani ekonomi keluarga secara berlebihan.

Program ketiga adalah Program Masa Pertumbuhan, yang mencakup pemantauan dan pemenuhan gizi bagi bayi, balita, anak-anak, hingga remaja. Program ini dilandasi oleh kesadaran bahwa masa pertumbuhan merupakan fase krusial yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Kekurangan gizi pada masa pertumbuhan dapat

menyebabkan gangguan fisik, seperti tubuh pendek atau kurus, serta berdampak pada perkembangan kognitif dan kesehatan jangka panjang.

Melalui Program Masa Pertumbuhan, pemerintah desa bersama mitra melakukan pemantauan rutin terhadap pertumbuhan anak dan remaja melalui kegiatan posyandu, pemeriksaan kesehatan, serta pendataan status gizi. Perdes akan mengatur kewajiban pemerintah desa untuk memastikan tersedianya program pemenuhan gizi yang sesuai dengan kebutuhan usia dan tahap perkembangan anak. Program ini juga menjadi bagian dari strategi pencegahan stunting secara berkelanjutan, karena tidak hanya berfokus pada bayi dan balita, tetapi juga mencakup anak-anak hingga remaja sebagai kelompok yang rentan mengalami gangguan pertumbuhan.

Ketiga program unggulan tersebut menunjukkan bahwa solusi penurunan stunting di Desa Perjuangan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi dirancang sebagai kebijakan jangka panjang yang terintegrasi dalam Peraturan Desa. Dengan adanya Perdes Penurunan Stunting, upaya penanganan gizi buruk memiliki dasar hukum yang kuat, melibatkan seluruh pemangku kepentingan desa, serta diharapkan mampu menurunkan angka stunting secara signifikan dan berkelanjutan.

Target luaran dari masing-masing solusi:

Kebijakan terhadap gizi buruk harus dijadikan menjadi suatu kebijakan yang utama dan paling utama pada setiap masa jabatan pemerintah desa. Kebijakan pemenuhan gizi dan menurunkan angka stunting harus dibuat regulasi berupa peraturan desa. Dengan adanya Peraturan Desa mengenai pemenuhan gizi dengan penurunan stunting maka permasalahan stunting di desa Perjuangan dapat diatasi. Pemerintah desa harus menjadikan peduli stunting menjadi bagian terpenting dalam setiap program pemerintah desa. Sehingga bila kepemimpinan pemerintah desa berganti maka program ini akan tetap diteruskan dan menjadi suatu program utama untuk mengatasi gizi buruk pada masyarakat desa. Dengan didukung oleh akademisi dan mahasiswa peduli stunting. Besar harapan masyarakat dapat hidup tumbuh dan sehat terhadap perkembangan masa pertumbuhan. Melalui pemenuhan gizi maka akan didapatkan suatu program hidup sehat dan menjadikan keluarga yang sehat dan menumpas segala bentuk penyakit serta menghilangkan stunting.

Hidup sehat merupakan suatu kebanggaan bersama, setiap orang pasti menginginkan kesehatan dalam kehidupannya tidak terlepas dari setiap keinginan bersama. Namun dalam menjalankan semua program ini tentulah tidak mudah. Setiap pihak harus terlibat dalam mendukung dan mensukseskan program ini. Program ini dapat berjalan pasti membutuhkan suatu kesungguhan yang harus dimiliki oleh mitra Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mengatasi gizi buruk. Pemerintah desa dalam hal ini sebagai mitra tentu mengalami suatu kesulitan dalam mengeksekusi program ini.

Pelaksanaan eksekusi program ini tentu mengkoordinasikannya dan membuat rencana-rencana serta mempersiapkan program tersebut. mitra Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) perlu memastikan bahwa di desa harus memiliki bidan desa. Bidan desa yang ada harus bersedia secara sukarela untuk bersedia menjadi tim kesehatan pada masyarakat desa yang secara khusus kepada ibu hamil dan pasca melahirkan. Bidan desa yang ada tentu tidak sebanding dengan banyaknya jumlah masyarakat desa atau terhadap jumlah ibu hamil atau pasca melahirkan. Oleh sebab itu mitra Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berupaya besar untuk menjadikan desa memiliki tenaga kesehatan desa yang jumlahnya perlu dilakukan penambahan untuk memastikan bahwa bidan desa dapat menjadi tenaga medis setiap waktu masyarakat desa membutuhkannya serta dibantu mitra Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa penyuluhan dan pendampingan penurunan stunting terhadap 18 warga Desa Perjuangan telah menunjukkan bahwa permasalahan stunting dapat ditangani secara lebih efektif melalui pendekatan kebijakan desa yang terintegrasi dan berkelanjutan. Stunting tidak hanya merupakan persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan desa yang membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara aktif dan berkesinambungan.

Penyusunan Peraturan Desa tentang Penurunan Stunting menjadi langkah strategis dalam memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan program pemenuhan gizi di Desa Perjuangan. Keberadaan Perdes tersebut mampu memperkuat komitmen pemerintah desa, PKK, tenaga kesehatan, serta masyarakat dalam menjalankan program penurunan stunting

secara terarah dan berkelanjutan, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan desa di masa mendatang.

Implementasi tiga program utama, yaitu Program Masa Kandungan, Program Pasca Melahirkan, dan Program Masa Pertumbuhan, menunjukkan bahwa pendekatan berbasis siklus kehidupan (*life cycle approach*) merupakan strategi yang tepat dalam mencegah dan menekan angka stunting. Program-program tersebut tidak hanya berfokus pada pemulihan kondisi gizi, tetapi juga pada upaya pencegahan sejak dini melalui pemantauan kesehatan, edukasi gizi, serta pemenuhan kebutuhan nutrisi yang sesuai dengan tahapan perkembangan manusia.

Selain itu, keterlibatan mitra Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan tenaga kesehatan desa terbukti menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program. Kolaborasi antara pemerintah desa, PKK, bidan desa, akademisi, dan mahasiswa menciptakan model kerja sama yang efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang stunting serta memperkuat pelaksanaan program pemenuhan gizi di tingkat desa.

Saran

Pemerintah Desa Perjuangan disarankan untuk menjadikan program penurunan stunting sebagai program prioritas desa yang bersifat berkelanjutan, dengan memastikan Peraturan Desa tentang Penurunan Stunting diimplementasikan secara konsisten dan didukung oleh alokasi anggaran desa yang memadai. Kebijakan ini perlu dijadikan bagian integral dari perencanaan pembangunan desa agar tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) diharapkan dapat terus memperkuat perannya sebagai ujung tombak pelaksanaan program pemenuhan gizi, khususnya dalam pendampingan ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga yang memiliki bayi dan balita. PKK juga disarankan untuk meningkatkan kegiatan edukasi gizi, pola asuh anak, serta pemantauan pertumbuhan secara rutin melalui posyandu dan kegiatan masyarakat lainnya.

Tenaga kesehatan desa, khususnya bidan desa, perlu mendapatkan dukungan yang lebih optimal, baik dari segi jumlah maupun sarana pendukung, agar pelayanan kesehatan ibu dan anak dapat dilakukan secara maksimal. Pemerintah desa bersama PKK disarankan untuk mengupayakan penambahan tenaga kesehatan desa atau kader kesehatan guna memastikan pemantauan kesehatan dapat dilakukan secara merata dan berkesinambungan.

Masyarakat Desa Perjuangan diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam setiap program penurunan stunting, terutama dengan melaporkan kehamilan sejak dini, mengikuti pemeriksaan kesehatan secara rutin, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga. Kesadaran dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program penurunan stunting di tingkat desa.

Perguruan tinggi, melalui dosen dan mahasiswa, disarankan untuk terus melakukan pendampingan dan penguatan kapasitas desa melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan. Sinergi antara akademisi dan pemerintah desa diharapkan dapat menghasilkan inovasi program serta evaluasi berbasis data guna meningkatkan efektivitas penurunan stunting di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- I. W. Putra dan R. F. Helmi, "*Peran Dinas Kesehatan dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Pasaman Barat*," Jurnal Pengabdian Masyarakat 8 (2024): 8815-8822.
- Christiana, E., Iva, C., Sari, F.C., Hilmah, N. & Pralita, A. 2025, 'Sobat GESIT: *Seluruh Keluarga Terlibat Gerakan Stop Stunting*, Jurnal Abdimas Bina Bangsa, vol. 51, pp. 175-182.
- A. Safirah, "*Pembuatan Puding Daun Kelor sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Desa Kuta Baru*" Jurnal Bakti Nusantara 11 (2023): 34-37.